

BAB III

GERAKAN POLITIK HTI SEBAGAI ORGANISASI ISLAM

EKSTRAPARLEMENTER DI INDONESIA

A. Profil Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dan Perkembangannya Di Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir (HT) atau *Liberation Party* (Partai Pembebasan) merupakan organisasi Politik Islam ideologi berskala Internasional yang aktif memperjuangkan dakwah Islam, agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya *khilafah Islamiyyah*. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyyudin al-Nabhani¹ (1909-1977), yang secara resmi dipublikasikan pada tahun 1953 di Al-Quds, Yerussalem.² Kemudian pusat gerakannya berpindah ke Yordania.

Sejak didirikan, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Taqiyyudin al-Nabhani hingga wafat, yakni tanggal 20 Juni 1977 M. Taqiyyudin al-Nabhani merupakan salah seorang ulama berpengaruh di Palestina, doktor lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, yang sebelumnya adalah seorang hakim agung di *Mahkamah Isti'naf*, al-Quds, Palestina.³ Sepeninggal Taqiyyudin al-Nabhani Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul

¹ Warga Palestina yang dilahirkan di Ijzim Qadha Haifa pada tahun 1909. (Ruwaifi" bin Sulaimi, *Kelompok Hizbut Tahrir dan Khilafah, Sorotan Ilmiah tentang Selubung Sesat Suatu Gerakan*, <http://www.asyariah.com>, diakses pada tanggal 22 Desember 2009, Jam 23.00. WIB)

² Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Taqiyyuddin al-Nabhani*, Bogor: Al-Izzah Press, 2002, hlm. 4.

³ Taqiyyudin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Nur khalish, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 359.

Qodim Zallum hingga wafat tahun 2003. saat ini kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syeikh Atha' Abu Rastah secara Internasional.⁴

Hizbut Tahrir telah beberapa kali berupaya pengambil alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, Mesir pada tahun 1973, dan serentak di Irak, Sudan, Tunisia, Al-Jazair pada tahun 1973, namun semuanya gagal. Sejak saat itulah Hizbut Tahrir mulai merubah setrategi perjuangannya dengan lebih banyak melontarkan wacana dan membina masyarakat melalui dakwah.⁵

Kegiatan dakwah banyak dilakukan oleh Hizbut Tahrir dengan mendidik dan membina masyarakat melalui training pengenalan *tsaqafah* (kebudayaan) Islam, memahamkan masyarakat tentang aqidah Islamiyah yang benar. Dakwah Hizbut Tahrir lebih banyak ditampakkan dalam aspek pergolakan pemikiran (*ash shira' al-fikr*). Hizbut Tahrir pula yang memperkenalkan istilah *ghazw alfikr* (perang pikiran) sebagai upaya meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah serta persepsi-persepsi yang keliru, membebaskannya dari pengaruh ide-ide barat, dan menjelaskannya sesuatu ketentuan Islam.⁶ Metode yang ditempuh dalam rekrutmen dan pembinaan anggota adalah dengan mengambil *thariqah* (metode) dakwah Rasulullah Muhammad saw. Menurut pemikiran Hizbut Tahrir kondisi kaum muslimin saat ini hidup di *darul kufur* (wilayah orang-orang kafir) karena mereka menerapkan hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan

⁴ Endang Turmudzi dan Riza Sihabudin (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2006, hlm. 265-266.

⁵ Ihsan Samarah, *op. cit.*, hlm. 5-6

⁶ Hizbut Tahrir, *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*. terj. Muhammad Maghfur, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 23.

Allah swt maka keadaan mereka serupa dengan makkah ketika Rasulullah Muhammad saw diutus untuk menyampaikan risalah Islam. Untuk itu fasi makkah dijadikan tempat berpijak dalam mengemban dakwah dan mensurituladani Rasulullah Muhammad saw hingga berhasil mendirikan suatu daulah Islamiyah di Madinah.

Dengan mencoba pola dakwah Rasulullah Muhammad saw, Hizbut Tahrir merumuskan tiga tahapan dakwah (*marhalah al-da'wah*) sebagai setrategi beserta cirinya, yaitu :

Pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan (*marhalah al-tatsqif*), melalui *halaqah-halaqah*. Tahapa ini dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan model Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai.

Kedua, tahapan berinteraksi dengan umat (*marhalah tafa'ul 'alal ummah*). Tahapan ini dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam., sehingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan umatnya, berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan.

Ketiga, tahapan pengambil alihan kekuasaan (*marhalah istilam al-hukm*). Tahapan ini dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.⁷

Hizbut Tahrir berjuang dan bergerak di tengah-tengah masyarakat dengan melontarkan wacana mendirikan kembali *khilafah Islamiyah*.

⁷ Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Abu Fuad dan Abu Raihan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 57-73.

Adapun maksud dan arti didirikannya khilafah oleh Hizbut Tahrir diantaranya adalah :

1. Penegakan hukum-hukum syari'ah ditengah-tengah kaum muslim, sekaligus pencampakan hukum-hukum kufur yang diterapkan atas mereka saat ini.
2. Penyebaran Islam ke seluruh dunia melalui dakwah dan jihad untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang-benderang.
3. Penyatuan negeri-negeri kaum muslim di dalam lindungan satu negara di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Tegaknya khalifah menandakan berakhirnya perpecahan dan ketercerai-beraian yang sengaja diadakan oleh kaum kafir dan kaki tangan mereka di negeri-negeri kaum muslim.
4. Pengembalian ikatan ukhuwah islamiyah, sebagaimana sabda Nabi....."Seorang Muslim adalah saudara muslim yang lain. Karena itu, ikatan ukhuwah adalah satu-satunya ikatan yang menggantikan ikatan-ikatan *Jahiliyah* seperti ikatan patriotisme, nasionalisme, kesukuan dan yang lainnya, yang telah memecah belah kaum muslim saat ini.
5. Kembalinya umat mendapatkan kekuasaannya yang telah dirampas. Umat juga memegang kembali kehendak dan keputusan di tangan mereka sendiri.
6. Pembebasan negeri-negeri kaum muslim yang dikuasai oleh kekuasaan yang *zolim*, seperti Irak, Afganistan, Kashmir, Timor Timur dan yang lain.
7. Realisasi jaminan pemenuhan makanan pokok bagi kaum muslim dengan menempuh strategi-strategi yang bertujuan menjamin pencapaian swasembada bahkan lebih baik, baik dari hasil-pertanian, peternakan, perikanan laut maupun darat.
8. Realisasi keamanan industrial melalui strategi politik pembangunan dan pengembangan industri berat untuk memproduksi berbagai peralatan, mesin-mesin pabrik dan persenjataan, sekaligus menghentikan sikap mengekor dan mengemis-ngemis di depan pintu negara-negara barat.
9. Pemberdayaan sumber daya umat yang amat besar melalui politik pendidikan yang bertujuan membuka ruang dan kesempatan bagi semua orang. Dengan demikian mereka menjadi orang-orang yang kreatif dan produktif demi kepentingan agama dan umat mereka. Dengan itu pula dapat mengurangi akumulasi jumlah pengangguran meski berijazah tinggi.
10. Pengembalian kekuasaan umat atas kekayaan-kekayaannya sehingga umat menjadi pemilik murni akan kekayaan-kekayaan itu.

11. Penyebarluasan kebaikan, keutamaan, keadilan serta penjagaan atas darah, kekayaan, kehormatan dan kemuliaan kaum muslim.⁸

Secara garis besar, Agenda yang di emban oleh Hizbut Tahrir, yakni melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tinjauan ini berarti mengajak kaum muslim kembali hidup secara Islami dalam *daulah Islam*, di mana seluruh kegiatan kehidupannya oleh aturan Islam.⁹

Hingga saat ini, Hizbut Tahrir memiliki pengikut puluhan juta yang tersebar luas di 40 negara dengan membentuk cabang-cabang seperti di Suriah, Libanon, Kuwait, Irak, Arab Saudi, Afrika Utara, Tunisia, Sudan, Turki, Pakistan, Malaysia, Inggris, Perancis, Jerman, Australia, dan termasuk Indonesia. Meskipun di beberapa negara tidak mendapat pengakuan resmi.¹⁰

2. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Perkembangannya

Pada dekade 1980-an, beberapa organisasi radikal Internasional mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia, seiring dengan berdirinya Hizbut Tahrir berskala Internasional, organisasi ini diteruskan ke berbagai negara di penjuru dunia termasuk Indonesia. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1982-1983, karena semangat dakwah dan dengan misi mengembalikan Islam ke dalam sistem *khilafah* secara International.

Pada Awal 1980-an HT menyebarkan gagasan khilafahnya ke berbagai

⁸ Ismail al-Wahwah, "Dunia Membutuhkan Khilafah", dalam Buletin *al-Wa'ie*, VII, edisi 1-31 September 2007, hlm. 13.

⁹ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur khalis, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 20.

¹⁰ John L. Esposito, (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995, hlm. 126.

kampus perguruan tinggi melalui Jaringan Lembaga dakwah kampus.¹¹ Karena pada saat itu konstelasi politik dibawah orde baru belum memungkinkan gerakan organisasi ini untuk muncul, karena terjadi ancaman intimidasi dan pembubaran dari penguasa, sehingga gerakan ini hanya melakukan aktivitas "di bawah Meja Sistem Negara".

Kemudian setelah lengsernya rezim soeharto tahun 1998 oleh gerakan reformasi, terjadi perubahan konstelasi politik, yakni era keterbukaan sehingga membuka peluang bagi organisasi-organisasi yang lama terkungkung oleh rezim soeharto mulai menampakkan statusnya termasuk Hizbut Tahrir.

Sejak terselenggarakannya Konferensi Internasional di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun Nasional, serta dihadiri tokoh-tokoh organisasi lain, Hizbut Tahrir Indonesia resmi melakukan aktifitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000. Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia kemudian disingkat dengan HTI. Para Tokoh HTI banyak yang bertempat tinggal di Bogor dan upaya mereka dalam mensosialisasikan gerakannya mendapat sambutan positif dari kalangan *civitas academica* Institut Pertanian Bogor (IPB), sehingga salah satu pimpinan pusat HTI adalah alumnus dan dosen IPB yakni Muhammad al-Khattat.¹² Untuk penanggungjawab kewilayahan nasional disebut Juru Bicara (Jubir) yang saat ini untuk Indonesia dipegang oleh

¹¹ Taufiq Adnan Amal, dkk, "*Politik Syariat Islam" dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004, hlm. 41.

¹² Endang Turmudzi dan Riza Sihabudin (ed.), *loc.cit.*

Ismail Yusanto. Sedangkan Ketua Umum Nasional dipegang oleh Hafidz Abdul Rahman.¹³

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibangun atas dasar kemandirian yang dalam pendanaan untuk operasional organisasi diperoleh dari simpatisan, dan tidak menerima bantuan dari pemerintah bahkan secara tegas menolak dan mengharamkan penerimaan uang dari pemerintah. Untuk menjaga kemandirian dan independensi inilah maka setiap sumbangan yang diberikan kepada HTI harus melalui penelitian secara seksama.¹⁴

Sejak awal Hizbut Tahrir maupun HTI memang di desain sebagai organisasi politik. Tetapi berbeda dengan organisasi politik yang dikenal selama ini. HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu. HTI menerjemahkan partai politik dalam pengertian yang luas, yaitu sebagai suatu organisasi yang aktifitasnya bertujuan mengoreksi kekuasaan dan membangunnya secara benar. Hal ini dilakukan karena menurut HTI dalam situasi sekarang ini banyak partai Islam justru membingungkan umat Islam sendiri. Oleh karena itu, HTI tidak mengikuti jejak partai-partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu yang kemudian dapat menjadi anggota legislatif.¹⁵ Namun tidak menutup kemungkinan pada saatnya nanti HTI akan berubah menjadi partai politik, sebagaimana yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir

¹³ *Ibid.*, hlm. 267.

¹⁴ Wawancara dengan Ust. Ir. Abdullah (Ketua HTI Jawa Tengah), pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2010, Pukul 17.00-18.30 WIB di kediamannya.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 266

Yordania, Libanon, dan lain sebagainya, karena secara tekstual dan kontekstual HT sangat mencita-citakan pembebasan, yakni membebaskan negeri-negeri kaum muslimin dari cengkraman "Penguasa Zolim atau Penjajah". Tentunya hal tersebut bisa terwujud manakala HTI masuk dalam sistem parlemen. Namun untuk menjadi partai politik peserta pemilu memerlukan waktu yang tepat.¹⁶

Sebagai bagian dari Hizbut Tahrir, HTI juga sangat menekankan pentingnya peran negara (*dawlah*) atau kekhilafahan sebagai sarana penerapan syari'ah Islam. Syari'ah dalam pandangan kelompok ini harus ditopang oleh kekuatan negara. Oleh karena itu, kelompok ini mengusung ide perlunya mendirikan kembali khilafah Islamiyah atau kekhilafahan Islam. Sementara kekhilafahan dalam Islam sendiri berakhir sejak tahun 1924 dengan lenyapnya khalifah Usmaniyyah dan diganti oleh sistem republik oleh kemmal Atatturk, Sejak itu negara modern dengan batas-batas teritorialnya menjadi model yang digunakan oleh masyarakat Muslim yang mendiami negara. Meskipun mereka berstatus mayoritas mutlak seperti masyarakat muslim Indonesia. Baik Hizbut Tahrir maupun HTI sendiri memang mengakui tidak ada teks al-Qur'an yang mewajibkan penganutnya mendirikan kekhalifahan, tetapi kewajiban itu diperoleh dalam perspektif kontekstual pesan al-Qur'an.¹⁷ Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, Islam telah memerintahkan umatnya agar mendirikan sebuah

¹⁶ Hafidz Abdurrahman, "Hizbut Tahrir Masuk Parlemen Mengapa Tidak?" dalam Majalah *Hidayatullah*, Surabaya: April 2005, hlm. 42.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 268

sistem pemerintahan dan mengangkat seorang *khilafah* yang memerintah berdasarkan hukum-hukum Islam.¹⁸ Perintah ini berdasarkan ayat :

..... فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Artinya :

"...Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu...". (Q.S. al-Maidah {5}: 48).¹⁹

Pemerintah atau *al-hukm* merupakan kekuasaan yang melaksanakan hukum dan aturan. Pemerintahan merupakan aktivitas kepemimpinan yang telah diwajibkan oleh syara' atas kaum muslimin. Aktivitas ini dipergunakan untuk menjaga terjadinya tindak kezaliman serta memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan seperti yang disebutkan dalam ayat :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Artinya :

"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah swt, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah yang telah diturunkan Allah kepadamu...". (Q.S. al-Maidah {5}: 49).²⁰

.....وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya :

¹⁸ Taqiyuddin al-Nabhani, *Nidham fi al-Islam*, Beirut Libanon: Dar al-Umah, 1996, hlm. 18

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. TEHAZED, 2009, hlm. 154.

²⁰ *Ibid.*

"...Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir". (Q.S. al-Maidah {5}: 44).²¹

Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, Islam sebagai ideologi bagi negara, telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai satu kesatuan yang integral dengan eksistensinya. Islam telah memerintahkan pemeluknya agar mendirikan negara dan pemerintahan, yang memerintah berdasarkan hukum-hukum syari'at, sebab para pemimpin itulah yang secara operasional melaksanakan pelayanan terhadap urusan-urusan umat secara langsung. Menurutnya, Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem *khilafah*. Sistem *khilafah* ini satu-satunya sistem bagi daulah Islam. *Khilafah* merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam.²²

Dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia, dalam hal ini dikemukakan oleh Ir. Abdullah (Ketua HTI Jawa Tengah). Ia mengemukakan bahwa kehidupan umat Islam sekarang ini berada dalam situasi yang tidak Islami, sebagai akibat dari berlakunya sistem sekuler yang dalam banyak hal memberikan andil besar bagi terciptanya kondisi sosial yang sangat buruk. Berbagai pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana maupun perdata, misalnya penegakan Undang-Undang Pornoaksi dan pornografi yang sudah merebak bebas di penjuru Indonesia, namun sistem yang ada mandul untuk melakukan penegakan hukum. Sehingga

²¹ *Ibid*, hlm.153

²² Taqiyuddin al-Nabhani, *op.cit.*, hlm. 20.

HTI memberikan solusi tentang sistem islami, Islam mempunyai sistem yang bisa membawa pada kebaikan. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan adalah mengganti sistem yang ada dengan sistem yang disediakan Islam. Islam harus ditampilkan dan menjadi agama Ideologis melalui *dawlah Islamiyah* dengan khalifah sebagai penguasanya. *Khalifah* ini yang wajib melakukan dengan mengubah pemikiran atau melakukan pertarungan (*gahzw al-fikr*), melaksanakan syari'ah, memimpin jihad, dan melindungi umat Islam. Dakwah merupakan satu-satunya untuk meraih keberhasilan untuk mendirikan khilafah ini. Meski demikian, para aktivis HTI tidak menerima cara-cara kekerasan, misalnya mengangkat senjata dalam upaya mendirikan khilafah itu. Dakwah dilakukan sebagai proses penyadaran agar manusia mau mengikuti hukum Allah.²³

Dengan demikian, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya bukan sosial keagamaan, namun demikian, sampai saat ini Hizbut Tahrir maupun HTI belum pernah mengikuti pemilu sebagaimana umumnya partai politik. Kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan HTI lebih banyak melontarkan ide-ide/wacana, dan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dipandang pro barat.

B. Aktifitas Politik HTI sebagai Organisasi Islam Ekstra Parleментар

²³ Wawancara dengan Ust. Ir. Abdullah (Ketua HTI Jawa Tengah), pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2010, Pukul 17.00-18.30 WIB di kediamannya.

Aktifitas Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah Islam untuk merubah kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam, dengan merubah ide-ide yang ada menjadi ide Islam, sehingga akan menjadi opini umum ditengah-tengah masyarakat, serta menjadi persepsi bagi mereka yang akan mendorongnya untuk merealisir dan menerapkannya sesuai dengan tuntutan Islam, juga dengan merubah perasaan yang dimiliki anggota masyarakat menjadi perasaan Islam, ridlo terhadap apa yang diridloi Allah, marah dan benci terhadap apa yang dimurkai dan dibenci Allah. Merubah hubungan/ interaksi yang ada di tengah-tengah masyarakat menjadi hubungan/ interaksi yang Islami, berjalan sesuai dengan hukum-hukum dan pemecahan-pemecahan Islam.²⁴

Seluruh aktifitas yang dilakukan Hizbut Tahrir bersifat politik, di mana Hizbut Tahrir memperhatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan yang syar'I. Sebab politik adalah mengatur dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan Islam.²⁵

Perjuangan politik Hizbut Tahrir Indonesia ini juga tampak jelas dalam menentang para penguasa, mengungkapkan penghianatan dan persekongkolan mereka terhadap umat, melancarkan kritik, kontrol dan koreksi terhadap mereka, serta berusaha menggantinya apabila hak-hak umat dilanggar atau tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat, atau jika mereka melalaikan salah satu urusan umat, atau mereka menyalahi hukum-hukum Islam.²⁶ Hal ini

²⁴ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut tahrir*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, Cet. III, 2009, hlm. 29.

²⁵ *Ibid.* hlm. 30.

²⁶ *Ibid.* hlm. 31.

dilakukan HTI diluar perkara pemerintahan ataupun yang menyangkut pemerintahan.

Disisi lain aktifitas HTI tidak bersifat akademik. HTI bukanlah sekolahan. Seruannya bukan berbentuk nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk (yang menjemukan dan kering). Aktifitasnya bersifat politik, dengan cara mengungkapkan *fikrah-fikrah* (ide) Islam beserta hukum-hukumnya, untuk dilaksanakan, diimban dan diwujudkan dalam kenyataan hidup bermasyarakat dan bernegara. Karena dengan dakwah dan penerapan hukum Islam inilah dapat menjawab dan memecahkan problematika manusia secara keseluruhan, baik dibidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan lain-lain.²⁷

Perjuangan harus terus berlanjut, tidak boleh berhenti, meskipun berbagai tantangan dan tekanan menghadang. Demikian prinsip penting Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam melakukan segala aktifitas. Perjuangan politik ini secara garis besar mencakup pembinaan intensif untuk mencetak kader-kader dakwah, membina umat dalam *tsaqafah Islam*, serta mengoreksi penguasa yang berseberangan dengan Islam dan merugikan umat, misalnya dengan mendatangi parlemen dan penguasa untuk mengkritisi kebijakan politik mereka. HTI juga selalu berusaha membongkar kebiadaban penjajah seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara sekutunya yang selama ini mencengkeram umat Islam, termasuk kerjasama mereka dengan para penguasa di negeri-negeri Islam.

²⁷ *Ibid*, hlm. 32.

Dengan aktifitas ini akan muncul kader-kader dakwah yang siap terjun untuk berdakwah sehingga terbentuk kesadaran umat untuk kembali kepada khilafah. Hal ini semakin diperkuat dengan dukungan *al-Quwwah* (elite politik strategis), sehingga untuk pertama kalinya secara terbuka Hizbut Tahrir mengampanyekan tentang kewajiban khilafah Islamiyah dalam konferensi International Khilafah Islamiyyah.²⁸

Dalam melakukan segala aktivitas operasional politik, HTI merujuk Surat Ali 'Imron ayat 104 yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

"Hendaklah ada diantara kamu umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh dengan ma'ruf (yang baik-baik) dan melarang dari yang mungkar, dan mereka itulah yang menang. (Q.S. Ali Imron {3}: 104).²⁹

HTI berkeyakinan wajibnya mendirikan partai politik. untuk mendirikannya maka harus menempuh tahapan pembinaan dan pengkaderan (*Marhalah at-Tastqif*). Pada tahapan ini perhatian HTI tidak dipusatkan kepada pembinaan tauhid dan akhlak mulia, akan tetapi HTI memusatkannya akan tetapi HTI memusatkannya kepada pembinaan kerangka *Hizb* (partai), memperbanyak pendukung dan pengikut, serta membina para pengikutnya

²⁸ DPP HTI Online, "Kaleidoskop Aktivitas Politik Dan Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia", dalam Internet, <http://www.hizbut-tahrir.or.id>, diakses pada tanggal 22 Desember 2009, Jam 23.00. WIB

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. TEHAZED, 2009, hlm. 79.

dengan halaqah-halaqah dengan *tsaqafah* (materi pembinaan) *hizb* secara intensif, hingga akhirnya membentuk partai.³⁰

Setelah berdirinya partai politik dan berhasil dalam tahapan pembinaan dan pengkaderan, kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah berinteraksi dengan umat (*Tafa'ul ma'al Ummah*). Tahapan ini penting untuk keberhasilan partai dalam mencapai tujuan. Karena sekalipun anggota partai banyak jumlahnya dalam masyarakat, tetapi jika tidak berinteraksi dengan umat, mereka tetap tidak akan mampu mengemban tugas sendiri sekalipun mereka kuat. Lain halnya jika umat bersama mereka.³¹ Pengertian berinteraksi dengan umat bukan berarti mengumpulkan umat disekitar mereka, tetapi yang dimaksud adalah memahami umat akan ideologi partai supaya menjadi ideologi umat.³²

Adapun Pada tahapan ini sasaran interaksinya ada empat : *Pertama* : Pengikut Hizbut Tahrir, dengan mengadakan pembinaan intensif agar mampu mengemban dakwah, mengarungi medan kehidupan dengan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik. Pembinaan intensif disini tidak lain adalah doktrin fanatisme organisasi dan loyalitas terhadap HTI. *Kedua* : Masyarakat, dengan mengadakan pembinaan kolektif /umum yang disampaikan kepada umat Islam secara umum, berupa ide-ide dan hukum-hukum Islam yang diadopsi oleh HTI, dan menyerang sekuat-kuatnya seluruh bentuk interaksi antar anggota masyarakat, begitu pula interaksi antara masyarakat dengan

³⁰ Taqiyudin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, Terj. Zakaria, Labib, Jakarta: HTI-Press, Cet. II, 2007, hlm. 62.

³¹ *Ibid.* hlm. 63

³² *Ibid.*

penguasanya. Taqiyudin An-Nabhani pernah menyampaikan kepada jama'ahnya, bahwa menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara sesama anggota masyarakat dalam rangka mempengaruhi masyarakat tidaklah cukup, kecuali dengan menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan rakyatnya dan harus digoyang dengan kekuatan penuh, dengan cara diserang sekuat-kuatnya dengan penuh keberanian. *Ketiga* : Negara-negara kafir Imperialis yang menguasai dan mendominasi negeri-negeri Islam, dengan berjuang menghadapi segala bentuk makar mereka. *Keempat* : Para penguasa di negeri-negeri Islam dengan menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan rakyatnya dan harus digoyang dengan kekuatan penuh, dengan cara diserang sekuat-kuatnya dengan penuh keberanian. Menentang penguasa yang dzolim, mengungkapkan penghianatan dan persekongkolan mereka terhadap umat, melancarkan kritik, kontrol dan koreksi terhadap penguasa serta berusaha menggantinya apabila hak-hak umat dilanggar atau tidak menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap umat, yaitu bila melalaikan salah satu urusan umat, atau penguasa yang menyalahi hukum-hukum Islam. Meskipun demikian, HTI telah membatasi aktivitasnya dalam dalam aspek politik tanpa menempuh cara-cara kekerasan (perjuangan bersenjata) dalam menentang para penguasa maupun orang-orang yang menghalangi dakwahnya.³³

Kemudian tahapan selanjutnya yakni pengambilalihan kekuasaan (*Istilaamul Hukmi*), tahapan ini merupakan puncak dan tujuan akhir dari

³³ Id_Online, "Sorotan Ilmiah Tentang Selubung Sesat Suatu Gerakan" dalam Situs *Internet* <http://www.asysyariah.com>, diakses tanggal 23 Desember 2009, Jam 20.00. WIB.

segala Aktivitas HTI. Tahapan ini dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh sebagai sebuah ideologi dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia. Inilah yang disebut metode *revolutioner*.³⁴ Tahapan pengambilalihan kekuasaan ini yang sampai sekarang ini belum tercapai oleh HTI. Inilah langkah-langkah yang harus ditempuh oleh partai didalam medan kehidupan untuk membawa ideologi ke medan kehidupan.

Adapun beberapa aktivitas HTI Sebagai Organisasi Islam Ekstraparlementer diantaranya adalah :

1. Maret 2002, ini merupakan pertama kalinya secara terbuka HTI mengkampanyekan tentang kewajiban khilafah Islamiyah dalam konferensi International khilafah Islamiyah di Senayan Jakarta. Pada bulan yang sama HTI menyerukan penegakan Syari'at Islam sebagai solusi problem multidimensi di Indonesia dalam kunjungannya kepada Wakil Presiden Hamzah Haz. Sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan terhadap serangan AS ke Irak, HTI melakukan *masirah (longmarch)* mendatangi beberapa kedutaan besar di Jakarta, seperti kedubes Saudi Arabia, Kuwait, Yaman, Syiria, Tunisia, Inggris, Perancis dan RRC.

2. Bulan Agustus 2002, Aksi kolosal lebih dari 20.000 massa HTI menuntut penegakan Syari'at Islam di depan gedung DPR dalam Sidang Istimewa DPR.

³⁴ Taqiyudin an-Nabhani, *op.cit.*, hlm. 76

3. Tanggal 29 April 2003, HTI menuntut agar RUU Sisdiknas tetap merujuk pada Syari'at Islam dan mengecam pihak sekular dan kristen yang berupaya mengsekularkan pendidikan nasional.

4. Tanggal 5 Oktober 2003, untuk mencegah disintegrasi negeri-negeri Islam, HTI mengadakan konferensi Islam menyambut Ramadhan 1424 H dengan tema "Menjaga kesatuan negeri-negeri Islam.". selain di Jakarta konferensi serupa juga diselenggarakan di Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Makasar.

5. 4 Januari 2004, HTI mencanangkan Gerakan Nasional Taqarrub Ilallah (mendekatkan diri kepada Allah). Melalui gerakan ini HTI berharap kesadaran tauhid masyarakat makin meningkat sehingga mereka mau menyelesaikan segala persoalan dengan Syari'at Islam. Pada tanggal 15 bulan yang sama Delegasi HTI mendatangi kedubes Prancis di Jakarta menyoal larangan pemakaian jilbab di Prancis.

6. 20 Februari 2004, Aksi "Raih kepemimpinan dan tegakan syari'ah Islam dan Khilafah" di Bundaran HI Jakarta dalam rangka 80 tahun runtuhnya daulah khilafah Islamiyyah yang dihadiri lebih kurang 20.000 massa. Acara diisi dengan orasi-orasi tokoh Islam nasional seperti Ust. Irfan S. Awwas (Ketua Tanfidziyah Majelis Mujahidin Indonesia), KH. Kholil Ridwan (Ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia), Ust. Hari Moekti, Ust. MR. Kurnia dan Ust. Farid Wadji (DPP HTI), Jubir HTI Ismail Yusanto dan pimpinan HTI saat itu Muhammad al-Khaththath. Aksi serupa diadakan diseluruh Indonesia.

7. 5 Maret 2004, Peluncuran buku partai politik Islam yang disusun oleh HTI serta situs www.hizbut-tahrir.or.id bersamaan dengan seminar khilafah yang diselenggarakan HTI dan Majelis ta'lim Dharmala. Pada tanggal 22 bulan yang sama HTI mengutuk sikap brutal pemerintah dan tentara Israel di daerah pendudukan Palestina.

8. 24 Juli 2004, Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi pendidikan, HTI menyelenggarakan Lokakarya Pendidikan Nasional di Jakarta dengan Pembicara antara lain Dr. Jayeng Baskoro (Mendiknas RI), Dr. Din Syamsuddin (MUI) dan Ir. Rahmat Kurnia, Msi (HTI).

9. 25 Mei 2004, Pengurus DPP HTI berkunjung ke kantor DPP PKS di Jalan Mampang Prapatan Raya Jakarta Selatan untuk menjalin persaudaraan Islam bagi penguatan dakwah bersama.

10. 11 September 2004, HTI melakukan masirah (longmarch) dan orasi dari lapangan Monas ke bundaran HI dengan tema "Tolak kepemimpinan sekular, Tegakkan Syari'ah dan Khilafah Islamiyah". Acara ini diikuti oleh puluhan ribu kaum muslimin dari berbagai kalangan, ulama, jama'ah pengajian, pelajar, mahasiswa, dosen, pengusaha, pengacara, birokrat hingga masyarakat awam. Hadir sebagai pembicara dalam aksi ini adalah Ustd. Farid Wadji (DPP HTI), A. Ahmad Sumargono (Politisi dan anggota DPR RI), H. Adhyaksa Dault (mantan ketua KNPI Pusat), KH. Mudzakir (FPI), Ahmad Michdan, Farid Poniman (FPI), Ir. Rahmat Kurnia, Msi dan Muhammad al-Khaththath (DPP HTI).

11. 24 Oktober 2004 (10 Ramadhan 1425), HTI bersama umat Islam mengadakan masirah (longmarch) dan orasi di depan Istana Negara dengan membacakan piagam Ramadhan yang isinya menuntut penegakan syari'ah Islam di Indonesia. Menyusul acara ini dilakukan kegiatan pengumpulan tanda tangan pro-syari'at Islam di seluruh Indonesia. Pada tanggal 28 bulan yang sama HTI mengutuk tindakan kekerasan atas tragedi yang terjadi di Tak Bai Provinsi Narathiwat Thailand yang menewaskan 84 Muslim Pattani.

12. 22 Desember 2004, Sebagai bentuk kesadaran politik akan keprihatinan masa depan anak-anak Indonesia, para Syabah/pemuda HTI melakukan masirah (longmarch) diseluruh Indonesia. Para ibu-ibu menyuarkan anti pornoaksi dan pornografi, kecaman terhadap eksploitasi perempuan dan mengingatkan wanita agar jangan lupa pada kodratnya sebagai ibu. Pada Bulan yang sama di beberapa tempat di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar, Kendari dan lainnya diadakan aksi penolakan kenaikan BBM. HTI menilai kebijakan ini akan menyengsarakan Rakyat dan bertentangan dengan syari'at Islam.

13. 22 Januari-Februari 2005, HTI mengirim relawan ke Aceh dan Sumut yang ditimpa bencana gelombang tsunami. Selain melakukan pelayanan medis, suplay logistik, HTI juga membantu membangun masyarakat aceh dengan program mental recovery yang berbasis Syari'at Islam. Bantuan dana mengalir dari para sahabat dan simpatisan HTI,

tidakhanya di Indonesia, tetapi juga dari wilayah dunia lain, untuk membantu saudara-saudara mereka di Aceh.³⁵

Disamping sejumlah aktivitas diatas, sebagai partai politik Ideologis, HTI terus melakukan upaya pembinaan terhadap anggotanya berupa halaqah-halaqah dengan buku-buku yang sistematis. Penuturan Ir. Abdullah (Ketua HTI Jawa Tengah), disamping menyuarakan aspirasi masyarakat, HTI juga bergerak bersama umat dengan mengisi berbagai macam kegiatan keumatan, seperti mengisi khutbah jum'at, ceramah ramadhan, ceramah hari besar Islam, dan kultum sebagai bagian dari pembinaan umum. Upaya rekrutmen juga dilakukan secara terus menerus melalui sejumlah *dawrah dirasah* dan training-training keIslaman. Semua itu merupakan bagian dari aktivitas politik dan dakwah HTI untuk membangun kesadaran umat dalam menegakkan syari'at dan khilafah Islamiyyah.³⁶

C. Format yang dibangun HTI dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Mayoritas ulama syari'ah dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nas-nas al-Qur'an dan Hadist nabawi.³⁷ Islam mewajibkan kepada penguasa untuk bermusyawarah dalam perkara-perkara umum, sebagaimana yang telah difirmankan dalam al-Qur'an :

³⁵ DPP HTI Online, dalam Situs *Internet*, <http://www.hizbut-tahrir.or.id>, diakses pada tanggal 23 Desember 2009, Jam 20.00. WIB

³⁶ Wawancara dengan Ust. Ir. Abdullah, pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2010, Pukul 17.00-18.30 WIB di kediamannya.

³⁷ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta, Amzah, 2005, hlm. 35

Asyuro : 38

..... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

"..... Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka" (Q.S as-Syura {42}: 38).³⁸

Jika musyawarah maksudnya adalah prinsip partisipasi politik dalam pemikiran politik barat, maka prinsip "*amar ma'ruf nahi munkar*" yang merupakan tujuan dari semua kewenangan dalam Islam, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah: "Semua kewenangan dalam Islam tujuannya hanyalah *amar ma'ruf nahi munkar*, pada hakikatnya tersimbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang yang memiliki kekuasaan, berarti mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam perkara-perkara umum dan juga dalam hukum, berawal dari kewajiban memberi nasehat (yang tulus) yang telah diperintahkan oleh Allah swt.³⁹ Dalam sebuah firman Allah swt :

..... إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

Artinya :

Apabila mereka bernasehat (dengan Ikhlas) kepada Allah dan Rasul-Nya (Q.S.at-Taubah : 91).⁴⁰

Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam menata semua dimensi kehidupan. Tidak dapat dibayangkan masalah pemerintahan dan menyerahkan pengelolaannya kepada orang-orang *fasik* dan *atheis*. Islam menghimbau untuk menata dan merinci tanggungjawab, sebab Islam membenci kekacauan dalam

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., hlm. 699.

³⁹ Farid Abdul Kholiq, op. cit., hlm. 39

⁴⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. TEHAZED, 2009, hlm. 270.

segala hal. Oleh karena itu sangat penting sekali keberadaan pemerintahan untuk mengelola suatu negara demi kebaikan negara tersebut.

Melakukan koreksi terhadap penguasa diperintahkan Allah atas kaum muslimin dan merupakan tugas individu sebagai pribadi serta tugas jama'ah sebagai kelompok. Tugas ini berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi munkar* yang telah disyariatkan oleh agama. Selain itu, mengoreksi para penguasa merupakan kegiatan politik, oleh karena itu akan lebih efektif apabila dilakukan oleh sebuah jama'ah atau partai politik. Maksud partai ini untuk mengoreksi (*muhasabah*) penguasa terhadap semua kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahannya.⁴¹

HTI memang salah satu Organisasi Islam yang bergerak diluar sistem pemerintahan, terlebih pada parlemen yang menjadi wakil rakyat sekaligus wadah aspirasi rakyat. HTI tidak pernah berada diluar masyarakat, tapi berjuang bersama-sama masyarakat dan mendidik masyarakat. Dalam tataran obyek dakwah, HTI tidak pernah membatasi. Dalam posisi seperti ini, ada banyak hal yang bisa diperoleh. Di antaranya, bisa menyalurkan aspirasinya ke mana-mana, termasuk ke parlemen, ke masyarakat, tanpa dicurigai ada kepentingan politik. karena keberadaan dan segala sesuatu yang dilakukan HTI adalah menyampaikan *fikrah* (pikiran) yang sudah dilakukan sejak HTI berdiri hingga sekarang.⁴²

Sebagai penopang stabilitas sistem pemerintahan, partai politik juga berfungsi sebagai jenjang menuju tangga pemerintahan melalui umat

⁴¹ Hizbut Tahrir, *op. cit.*, hlm. 85.

⁴² Hafidz Abdurrahman, *op. cit.*, hlm. 42.

(perwakilan). Untuk merealisasikannya tentu partai yang dimaksud harus berdiri di atas landasan akidah Islam. Adalah hal yang sangat ironis apabila partai tersebut tidak berlandaskan Islam seperti partai komunis, sosialis, kapitalis, nasionalis, kesukuan atau partai yang menyerukan demokrasi dan sekularisasi. Parpol juga harus bersifat terbuka, bukan partai bawah tanah, karena tugas untuk mencapai kekuasaan melalui tangan umat merupakan suatu hal yang terbuka, bukan dengan cara bersembunyi. Yang tidak kalah pentingnya, tugas-tugas partai dalam pemerintahan Islam bukan berupa tugas-tugas yang bersifat fisik, sehingga media-media yang digunakan bersifat damai dan tidak mempergunakan senjata serta kekerasan lainnya.⁴³

Dalam sistem yang dibangun HTI, pengontrolan dan pengawasan terhadap pemerintah juga dilakukan oleh majelis umat. Oleh karena itu, Majelis umat harus ada dalam sistem pemerintahan. Majelis umat ini berfungsi sebagai pertimbangan pemerintah dalam urusan-urusan umat. Majelis umat juga menjadi wakil dalam menyampaikan aspirasi umat baik secara individu maupun kolektif.⁴⁴

Keanggotaan majelis umat ini terdiri atas orang-orang yang mewakili aspirasi warga negara, baik muslim maupun non muslim. Mereka mewakili umat dalam melakukan *syura* dan *muhasabah* (kontrol dan koreksi) terhadap para pejabat pemerintahan.⁴⁵ Karena majelis ini mewakili umat, maka akan lebih ideal apabila anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, baik

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.* hlm 86

⁴⁵ Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizam al-Hukum fi al-Islam*, Beirut Libanon: Daar al-Umah, tt. hlm 216.

independen maupun mewakili parpol, bukan penunjukan maupun pengangkatan. Non muslim yang tinggal di negara Islam pun berhak dipilih menjadi anggota, termasuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para pejabat pemerintah terhadap mereka.

Meskipun majelis ini mewakili umat, namun mereka tidak berwenang membuat aturan sebagaimana dalam sistem demokrasi. Wewenang mereka hanya menyampaikan aspirasi umat dalam menyampaikan pendapat. Hal inilah yang menjadikan semua warga negara berhak menjadi wakil dan berhak mewakilkan kepada siapa saja , baik itu muslim maupun non muslim, pria maupun wanita. Inilah yang disebut HTI dengan sistem khilafah. Sistem khilafah memberikan hak yang sama terhadap rakyat, karena memandang rakyat semata-mata sebagai manusi, terlepas dari agama, suku, ras, maupun jenis kelamin. Khalifah tidak boleh melakukan diskriminasi antara manusia yang satu dengan yang lain, melainkan akan memperlakukannya dengan adil, di mana mereka dilihat sebagai warga daulah Islam.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*